

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

Oleh : Alkausari Trinandika Milandry

Email : milandryalkausari2207@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kota Pekanbaru berperan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian, dan perdagangan. Dengan adanya peran tersebut menyebabkan Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk yang sangat drastis. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah dan kompleksitas sampah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui bank sampah dan rumah kompos dan penanganan sampah sehingga dapat meminimalisir tingkat produksi sampah setiap harinya. Pengelolaan Sampah berada dibawah wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan persampahan dengan meningkatkan, mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, serta menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun yang menjadi permasalahan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki tidak mampu untuk menangani permasalahan persampahan di Kota Pekanbaru, minimnya kesadaran masyarakat untuk hidup minim sampah dan kurang tegasnya Pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang ada, baik Peraturan Daerah, Peraturan Walikota maupun Surat Edaran mengenai pengelolaan sampah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data dan penyajian data. Teori yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan yaitu teori Implementasi Kebijakan.

Hasil penelitian penulis adalah pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018 belum berjalan secara maksimal. Kurangnya fasilitas dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan permasalahan persampahan ini tidak pernah selesai serta minimnya sosialisasi terkait aturan yang ada membuat rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan hidup minim sampah.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan

THE IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT BY THE GOVERNMENT OF PEKANBARU IN 2018

By: Alkausari Trinandika Milandry

Correspondence: milandryalkausari2207@gmail.com

Advisor: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Pekanbaru city plays a role as the center of government, education, industry and trade. It increases the population extremely. This is one of the triggers of increasing the amount and complexity of waste. In order to minimize the amount of waste, some of terms have done by waste bank and compost houses. Waste management is one of the authorities of City Environment and Sanitation Service Department of Pekanbaru. It aims to cover the solid waste problem by increasing, encouraging and facilitating the provision of facilities and infrastructure, as well as growing public awareness in waste management. However, there are some sources pertinent to the waste management. They are the unable infrastructure and facilities, lack of the public awareness and the less strictness of both Regional and Mayor Regulations and Circular on waste management.

The recent research aimed to identify the implementation of waste management by the government of Pekanbaru in 2018 by using descriptive qualitative method. Furthermore, the data were collected by using documentation and interview. They were analyzed by collecting the information, data reduction, and data presentation. Additionally, the theory of policy implementation was applied.

The result found that the implementation of waste management by the Pekanbaru Government in 2018 has not been running optimally. The lack of facilities, supervision of the government and socialization of the regulation have resulted the waste problem hard to solve.

Keyword: Waste management, policy implementation

A. Pendahuluan

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang memiliki lokasi strategis yang berperan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian, dan perdagangan. Dengan adanya peran tersebut menyebabkan Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk yang sangat drastis. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah dan kompleksitas sampah

Tabel 1.1

Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru 2017-2018

No	Kecamatan	Volume Produksi Sampah (ton/hari)		Volume Sampah yang diangkut ke TPA (ton/hari)	
		2017	2018	2017	2018
1	Bukit Raya	35,55	54,14	29,02	41,73
2	Lima Puluh	26,14	26,68	19,84	17,41
3	Marpoyan Damai	26,14	56,58	25,31	52,59
4	Payung Sekaki	34,35	48,68	30,52	36,45
5	Pekanbaru Kota	41,59	37,18	21,98	10,54
6	Rumbai	13,65	27,04	9,04	21,10
7	Rumbai Pesisir	16,27	29,28	15,89	27,15
8	Sail	27,12	21,47	8,08	9,02
9	Senapelan	39,78	35,04	20,52	15,35
10	Sukajadi	39,18	44,02	37,77	19,90
11	Tampar	97,90	121,54	57,26	96,20
12	Tenayan Raya	19,89	66,65	3,69	23,87
Jumlah		417,56	568,3	278,97	371,31

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018, volume produksi sampah lebih tinggi dibandingkan dengan volume sampah yang ditangani. Selain itu, volume produksi sampah meningkat dari tahun 2017 yaitu 417,56 ton/hari menjadi 568,3 ton/hari pada tahun 2018. Untuk mengatasi peningkatan jumlah produksi sampah,

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pasal 12 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Namun. kegiatan pengurangan dan penanganan sampah ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Ada beberapa fenomena yang penulis temukan.

1. Belum adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Pekanbaru mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik guna untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang semakin hari semakin meningkat.

Tabel 3.18
Persentase Komposisi Sampah di Kota Pekanbaru

Komposisi Sampah	Tahun (%)	
	2017	2018
Organik (Sisa Makanan)	33	43

Kertas	14	11
Kaca	2	2
Plastik	24	32
Logam	1	1
Kayu	4	2
Kain	4	4
Karet	4	2
dan lain-lain	14	3
Total	100	100
	%	%

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020

2. Kapasitas lahan TPA tidak lagi mencukupi untuk menampung sampah yang setiap hari masuk karena tidak adanya pembatasan atau pengurangan sampah
3. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengurangan sampah terutama penggunaan barang sekali pakai

Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru

B. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

George C. Edward III menyatakan ada 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi,
2. Sumber Daya,

3. Disposisi,
4. Struktur Birokrasi

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Staf Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah DLHK Kota Pekanbaru, Staf Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah DLHK Kota Pekanbaru, Petugas Bank Sampah (1 orang setiap Bank Sampah), Petugas Rumah Kompos Hutan Kota, Leader PT Samhana Indah, Kepala Administrasi PT Godang Tua Jaya, Organisasi Masyarakat (Duta Lingkungan 2018), Aktivistis Lingkungan dan masyarakat selaku pihak yang merasakan kebijakan yang sudah diterapkan.

Kemudian data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan penelitian dalam bentuk wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut diperoleh data tentang pelaksanaan pengelolaan sampah

oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2018. Selain itu juga dilakukan penelusuran dokumen guna mendapatkan data yang lebih tepat dan akurat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dilakukan dengan 2 cara yaitu pengurangan dan pemanfaatan sampah dan penanganan dan pemrosesan akhir sampah diamati dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Pada kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah pihak yang terlibat yaitu Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, pengawas bank sampah dan rumah kompos dan petugas bank sampah dan rumah kompos. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kegiatan penanganan sampah dan pemrosesan akhir sampah yaitu Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, PT Godang Tua Jaya, PT. Samhana Indah, pengawas penyapuan jalan dan pengangkutan sampah, petugas penyapuan jalan dan petugas pengangkutan sampah

Dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, komunikasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara

langsung melalui masing-masing pengawas di setiap kegiatan sedangkan secara tidak langsung melalui grup whatsapp. Informasi yang diberikan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan telah jelas dan konsisten.

2. Sumber Daya

Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dilihat dari 3 indikator yaitu staf, kewenangan, dan fasilitas. Pada kegiatan pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki 57 orang pegawai yang terbagi pada bank sampah dan rumah kompos. Pada kegiatan penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki 702 pegawai yang terbagi pada penyapuan jalan dan pengangkutan sampah. Sedangkan pegawai yang dimiliki oleh pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya (Zona 1) 129 orang dan PT. Samhana Indah (Zona 2) 399 orang. Masing-masing pegawai ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan wewenangnya.

Pada kegiatan pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan PT Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah.

Tabel 1.5
Pembagian Wilayah Pengangkutan Sampah di Kota Pekanbaru

No	Pelaksana	Pembagian Wilayah	Zona

1	PT. Godang Tua Jaya	Tampam, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai	I
2	PT. Samhana Indah	Bukit Raya. Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tenayan Raya, dan Lima Puluh	II
3	DLHK Pekanbaru	Rumbai dan Rumbai Pesisir	III

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan tentunya memiliki sarana dan prasarana. Dalam hal ini, masing-masing kegiatan memiliki masalah dan kendala mengenai fasilitas yang ada. Pada bank sampah kekurangan gudang penyimpanan dan mesin jahit, pada salah satu rumah kompos mesin pengayak tidak bisa digunakan, pada penyapuan jalan kekurangan kantung plastik, dan pada pengangkutan sampah banyaknya kendaraan angkutan sampah yang rusak yang memperlambat proses pengangkutan sampah setiap harinya.

3. Disposisi

Pada kegiatan pengurangan sampah, Sikap petugas bank sampah dan petugas rumah kompos berpengaruh terhadap sikap

pengawas. Kurangnya pengawasan dalam kegiatan bank sampah dan rumah kompos berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan pegawai. Sedangkan pada kegiatan penanganan sampah, sikap petugas pengangkutan sampah yang masih sering tidak disiplin dan datang tidak tepat waktu yang membuat hasil pengangkutan sampah tidak maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pelaksanaannya belum sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada Perwako No 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah.

5. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, yaitu :

- a. Tidak sesuainya antara pelaksanaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- b. Tidak tegasnya pelaksanaan sanksi yang ditetapkan pada setiap kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

- c. Minimnya informasi yang memadai pada pelaksanaan pengelolaan sampah.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Hidup Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari teori implementasi kebijakan belum diterapkan secara maksimal. Dari 4 variabel dalam teori implementasi kebijakan hanya 1 variabel saja yang telah diterapkan secara baik yaitu komunikasi. Pada variabel sumber daya indikator fasilitas masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pada variabel disposisi, masih kurangnya pengawasan sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kedisiplinan pegawai, dan pada variabel struktur birokrasi, pelaksanaan pengelolaan sampah belum sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru, Surat Edaran tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah, memfasilitasi sarana dan prasarana pada kegiatan bank sampah dan rumah kompos, meningkatkan pengawasan pada pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak ketiga serta tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan.
2. Untuk pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah agar lebih disiplin dalam mengangkut sampah sesuai jam operasional yang sudah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja.
3. Untuk DPRD Kota Pekanbaru khususnya Komisi IV bidang Lingkungan Hidup agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

4. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru, sangat diharapkan kesadarannya dalam mengelola sampah, baik dalam disiplin membuang sampah maupun dalam menerapkan hidup minim sampah.

Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial". Alfabeta : Bandung

Syahza, Almasdi, 2014, *Metodologi Penelitian*, Unri Press: Pekanbaru

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. C A P S* : Yogyakarta

Zaini Ali. Imam, Raden. 2015. *Teori Kebijakan Publik*, Marpoyan Tujuh Publishing : Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

Ahmadi, Rulam . 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Bungin, Burhan 2015, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Prenada Media Group

Djopari. 2011. *Kebijakan Pemerintah*. Universitas Terbuka : Jakarta

Mamang Sangadji, Etta 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : C.V Andi Offset

Prastowo. Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media : Yogyakarta

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik "Panduan Praktis*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Informasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2018-2019

Skripsi

Hidayatullah Lubis. 2017. *Penyediaan Pelayanan Publik dalam Persoalan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016*

Ajisaka Prabowo. 2018. *Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Usaha Kelompok Bank Sampah Asri Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2017*

M.Ikhsan Ramadhan. 2019. *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Melalui Rumah Kompos oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017*

Ria Riska Puspitasari. 2017. *Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015*

Jery Nov Pratama. 2018. *Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016).*